



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS PEKERJAAN UMUM
SUMBER DAYA AIR DAN PENATAAN RUANG PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBER DAYA AIR DAN PENATAAN RUANG
PROVINSI JAWA TENGAH

NOMOR : 100.3.3/134

TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN (PPK) DAN PEJABAT
PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK) DINAS PEKERJAAN UMUM
SUMBER DAYA AIR DAN PENATAAN RUANG PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN ANGGARAN 2025

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBER DAYA AIR DAN PENATAAN RUANG
PROVINSI JAWA TENGAH

- Menimbang :
- a. Bahwa guna ketertiban dan kelancaran penatausahaan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2025 yang dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah perlu ditetapkan Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK);
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf (a), agar pelaksanaannya dapat berdaya guna dan berhasil guna, dipandang perlu untuk menetapkan keputusan kepala dinas;
 - c. bahwa, nama nama tersebut dalam lampiran dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk ditunjuk sebagai Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Tengah.
- Mengingat :
1. Undang - Undang RI No. 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah;
 2. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003, tentang Keuangan Negara;
 3. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004, tentang Perbendaharaan Negara;
 4. Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2004, tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
 5. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah;

6. Undang - Undang RI No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
8. Peraturan Pemerintah Np. 27 tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah;
9. Peraturan Presiden RI Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Ke empat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa;
10. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tanggal 9 Desember 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 14 tahun 2020 tanggal 18 Mei 2020 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi;
14. Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2025 (30 Desember 2024, LD 12 NOREG 15-339/2024);
16. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 60 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Tengah;
17. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 37 Tahun 2018, tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Tengah tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Tengah;
18. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 38 Tahun 2024, tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 sebagai landasan Operasional Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (tgl. 30 Desember 2024, BD Tahun 2024 Nomor 39);
19. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor ... Tahun 2024, tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2025;
20. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 821.3/695/2021 Tanggal 31 Desember 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrator kedalam Jabatan Fungsional di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;
21. DPA Dinas PUSDATARU Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2025 Nomor : 00392/DPA/2024 Tanggal 30 Desember 2024.
22. Surat Gubernur Jawa Tengah Nomor 821.3/54, Tanggal 10 Januari 2022, perihal tindak lanjut penyetaraan Jabatan Fungsional.
23. Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Tengah nomor 821.2/250/2022 tanggal 1 Agustus 2022 tentang Pengangkatan dalam Jabatan Pengawas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;
24. Keputusan Gubernur Jawa Tengah nomor 100.3.3.1/1 Tahun 2025

tanggal 2 Januari 2025 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Keuangan Pada Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2025.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- PERTAMA** : Menunjuk Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, (PPTK) Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2025, sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini;
- KEDUA** : Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Tengah, terdiri dari :
- Koordinator Pejabat Penatausahaan Keuangan;
 - Penyusun Laporan Keuangan;
 - Pengurus Barang / Pembantu Pengurus Barang;
 - Verifikator
 - Pembantu Bendahara Pengeluaran / Pembantu Bendahara Penerima.
- KETIGA** : Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Tengah, mempunyai tugas dan wewenang:
- Melakukan verifikasi SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU, dan SPP-LS beserta bukti kelengkapannya yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu;
 - Menyiapkan SPM;
 - Melakukan verifikasi laporan pertanggungjawaban Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu dan Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu;
 - Melaksanakan fungsi akuntansi pada SKPD termasuk akuntansi aset; dan
 - Menyusun laporan keuangan SKPD.
- KEEMPAT** : Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Tengah mempunyai tugas:
- Mengendalikan dan melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan;
 - Menyiapkan dokumen anggaran dan beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan mencakup dokumen administrasi kegiatan maupun dokumen administrasi yang terkait dengan persyaratan pembayaran yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang – undangan;
 - Membantu PPKom dalam menyiapkan dokumen pengadaan barang/jasa pada kegiatan sesuai ketentuan peraturan perundang – undangan;
 - Menandatangani bukti pengeluaran belanja atas nama PA/KPA berdasarkan kewenangan yang diberikan PA/KPA;
 - Mempertanggungjawabkan kepada Bendahara Pengeluaran / Bendahara Pengeluaran Pembantu paling lama 15 (lima belas) hari kerja setelah uang muka kerja / panjar diterima; dan

- Melaporkan hasil pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada angka 1 sampai dengan angka 5 PA/KPA.

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : SEMARANG.
PADA TANGGAL : 2 Januari 2025

Plt. KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM
SUMBER DAYA AIR DAN PENATAAN RUANG
PROVINSI JAWA TENGAH
Kepala DPU BMCK Provinsi Jawa Tengah
Selaku Pengguna Anggaran



AR. HANUNG TRIYONO

TEMBUSAN :

- Gubernur Jawa Tengah ;
- Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah ;
- Inspektur Provinsi Jawa Tengah ;
- Kepala Biro Bangda Setda Provinsi Jawa Tengah ;
- Kepala Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Prov. Jateng ;
- Para Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom) ;
- Sekretaris Dinas PUSDATARU Prov. Jateng ;
- Pejabat Penatausahaan Keuangan yang bersangkutan ;
- Bendahara Pengeluaran / Bendahara Pengeluaran Pembantu Dinas PUSDATARU Prov. Jateng ;
- Bendahara Penerimaan / Bendahara Penerimaan Pembantu Dinas PUSDATARU Prov. Jateng.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBER DAYA
AIR DAN PENATAAN RUANG PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR : 100.3.3/134
TANGGAL : 2 Januari 2025

DAFTAR PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN (PPK) DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBER DAYA AIR DAN PENATAAN RUANG
PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN ANGGARAN 2025

No	Nama dan NIP	Selaku	Program/Kegiatan
1	2	3	4
	PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN (PPK) SKPD		
1	HENRI SHOFA, SSTP. M.Si NIP. 19770207 199703 1 005	Koordinator Pejabat Penatausahaan Keuangan	Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Tengah
2	RONI PRASETIA,ST,M.Sc NIP. 19800415 201502 1 001	Penyusun Laporan	Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Tengah
3	SUGENG ADI NUGROHO, SE, MT NIP.19690111 199003 1 005	Verifikator	Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Tengah
4	GHILBA DZIBA BOURGUIBA, A.Md. Ak NIP. 19990321 202201 2 004	Penyusun Laporan	Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Tengah
5	BYAK JATININGSIH , SE NIP. 19670624 199109 2 001	Verifikator	Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Tengah
6	TATY KADARSIH, SE NIP. 19750422 199703 2 002	Verifikator	Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Tengah
7	ANDY RADITYO KRIDA SUSILO, ST NIP. 19800914 201101 1 006	Verifikator	Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Pemali Comal
8	VERA HARI DHAMAYANTI, ST, M.Sc NIP. 19770922 201001 2 007	Verifikator	Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Bodri Kuto
9	IMAM SUYUTI ABDUL KARIM,ST NIP. 19820410201101 1 010	Verifikator	Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Serang Lusi Juana
10	SOFI NURHAYATI NIP. 19740419 200701 2 003	Verifikator	Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Bengawan Solo
11	RENDA FAIZAL RACHMAN,ST NIP. 19940628 202203 1 007	Verifikator	Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Progo Bogowonto Luk Ulo

No	Nama dan NIP	Selaku	Program/Kegiatan
1	2	3	4
12	PENI SADYASTUTI, SE NIP. 19670704199203 2 010	Verifikator	Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Serayu Citanduy
13	WAHYU PRAWESTI, A.Md. NIP. 19980220 202012 2 007	Pengurus Barang Pembantu	Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Tengah
14	ISWANDARI,SE NIP.196910181991012001	Pembantu Bendahara Pengeluaran	Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Tengah
15	ASHARI NIP. 19690323 199110 1 0001	Pembantu Bendahara Pengeluaran	Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Tengah
16	FRANSISKA NITA WAHYU OKTAVIANI,A.Md.Ak NIP. 199910042022012001	Pembantu Bendahara Penerimaan	Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Tengah

SEMARANG , 2 JANUARI 2025
 Plt.KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM
 SUMBER DAYA AIR DAN PENATAAN RUANG
 PROVINSI JAWA TENGAH
 Kepala Dinas BMCK Provinsi Jawa Tengah



AR. HANUNG TRIYONO

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBER DAYA
AIR DAN PENATAAN RUANG PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR : 100.3.3/134
TANGGAL : 2 Januari 2025

DAFTAR :
PERUBAHAN KE TIGA PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK) DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBER DAYA AIR DAN PENATAAN RUANG
PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN ANGGARAN 2025

No	Nama, NIP dan Jabatan	Selaku	Nomor DPA	Program/Kegiatan	Keterangan
1	2	3	4	5	6
	PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK)			SEKRETARIAT	
1	SETIYATI NURUL HIDAYAH, S.Sos, M.Si NIP. 19670204 199010 2 001 Kepala Sub Bag Umum dan Kepegawaian	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
			00392/ DPA/2025	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
			00393/ DPA/2025	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
			00394/ DPA/2025	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	
			00395/ DPA/2025	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
			00396/ DPA/2025	Administrasi Umum dan Perangkat Daerah	
			00398/ DPA/2025	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
			00399/ DPA/2025	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
2	MUCHAMAD ALI NIDHOM, ST NIP. 19760426200903 1 006 Surveyor Pemetaan Ahli Muda	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)		BIDANG PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN TEKNIS Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	
			00400/ DPA/2025	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota	
			00401/ DPA/2025	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha - 3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	
				BIDANG IRIGASI DAN AIR BAKU Program Pengelolaan Sumber Daya Air	
3	SISWO SUBAGYO, ST, MT NIP. 19670817 198809 1 002 Teknik Pengairan Ahli Muda	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)	00402/ DPA/2025	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota	
			00403/ DPA/2025	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha - 3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	
				BIDANG SUNGAI, BENDUNGAN DAN PANTAI Program Pengelolaan Sumber Daya Air	
4	NUR HIDAYAT, ST NIP. 19761026 200501 1 008 Teknik Pengairan Ahli Muda	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)	00404/ DPA/2025	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota	
				BIDANG PENATAAN RUANG Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	
5	HARI ADI AGUS SETYAWAN, ST, MT NIP. 19800817 200501 1 012 Penataan Ruang Ahli Muda	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan	00405/ DPA/2025	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Rinci Tata Ruang Provinsi	
			00406/ DPA/2025	Koordinasi dan Perencanaan Ruang Daerah Provinsi	
			00407/ DPA/2025	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi	
			00408/ DPA/2025	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Ruang Daerah Provinsi	
				BALAI PEMALI COMAL Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
6	YUDI ISKANDAR, ST. M.PSDA NIP. 19830227 201001 1 015 Teknik Pengairan Ahli Muda	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)	00409/ DPA/2025	Administrasi Umum Perangkat Daerah	
			00410/ DPA/2025	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
			00411/ DPA/2025	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
			00412/ DPA/2025	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/ Kota	

No	Nama, NIP dan Jabatan	Selaku	Nomor DPA	Program/Kegiatan	Keterangan
1	2	3	4	5	6
			00413/ DPA/2025	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha - 3000 Ha dan Daerah irigasi Lintas Daerah Kabupaten / Kota	
			00414/ DPA/2025	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi	
				BALAI BODRI KUTO Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
7	SYAM SAHIDA ALI MUSTOFA, ST, MT NIP. 19691109 199803 1 002 Teknik Pengairan Ahli Muda	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)	00415/ DPA/2025	Administrasi Umum Perangkat Daerah	
			00416/ DPA/2025	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
			00417/ DPA/2025	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
			00418/ DPA/2025	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/ Kota	
			00419/ DPA/2025	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha - 3000 Ha dan Daerah irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	
			00420/ DPA/2025	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi	
				BALAI SERANG LUSI JUANA (SELUNA) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
8	MUHAMAD NURHADI, SST. MT NIP. 19670503 199603 1 001 Teknik Pengairan Ahli Muda	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)	00421/ DPA/2025	Administrasi Umum Perangkat Daerah	
			00422/ DPA/2025	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
			00423/ DPA/2025	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
			00424/ DPA/2025	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/ Kota	
			00425/ DPA/2025	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha - 3000 Ha dan Daerah irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	
			00426/ DPA/2025	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi	
				BALAI BENGAWAN SOLO Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
9	HERMANTO, ST NIP. 19681220 199103 1 012 Kasubag Tata Usaha	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)	00427/ DPA/2025	Administrasi Umum Perangkat Daerah	
			00428/ DPA/2025	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
			00429/ DPA/2025	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
			00430/ DPA/2025	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/ Kota	
			00431/ DPA/2025	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha - 3000 Ha dan Daerah irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	
			00432/ DPA/2025	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi	
				BALAI PROGO BOGOWONTO LUK ULO (PROBOLO) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
10	AGUSTINUS CITRA SANDI PURNAMA,ST NIP. 19750822 201001 1 014 Kasubag Tata Usaha	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)	00433/ DPA/2025	Administrasi Umum Perangkat Daerah	
			00434/ DPA/2025	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
			00435/ DPA/2025	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
			00436/ DPA/2025	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/ Kota	

No	Nama, NIP dan Jabatan	Selaku	Nomor DPA	Program/Kegiatan	Keterangan
1	2	3	4	5	6
			00437/ DPA/2025	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha - 3000 Ha dan Daerah irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota Daerah Irigasi yang luasnya 1000 Ha - 3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/ Kota	
			00438/ DPA/2025	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi Provinsi	
				BALAI SERAYU CITANDUY (SERCIT)	
				Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
11	BAMBANG EKO JATMOKO, ST, MT NIP. 19740218 200701 1 006 Teknik Pengairan Ahli Muda	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)	00439/ DPA/2025	Administrasi Umum Perangkat Daerah	
			00440/ DPA/2025	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
			00441/ DPA/2025	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
			00442/ DPA/2025	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/ Kota	
			00443/ DPA/2025	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha - 3000 Ha dan Daerah irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota Daerah Irigasi yang luasnya 1000 Ha - 3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/ Kota	
			00444/ DPA/2025	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi Provinsi	

SEMARANG , 2 JANUARI 2025
Pit.KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM
SUMBER DAYA AIR DAN PENATAAN RUANG
PROVINSI JAWA TENGAH
Kepala Dinas BMCK Provinsi Jawa Tengah



AR. HANUNG TRIYONO